STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI ONLINE RAKYAT (LAPOR)

 Laporan yang tidak lengkap tidak bisa ditindaklanjuti Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penanganan pengaduan tidak bisa dilaksanakan 	maupun elektroni	면 다른 제공들은 이번, 설명, 여러, 100명, 100명, 100명, 100명, 100명, 100명 등이 이번 이번 시간 100명 등이 있다. 이번 시간 100명 등이 100명 등이 100명 등이		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan 1. semua pengaduan harus dicatat dan diarsipkan baik secara manual			
2. Pengintegrasian seluruh Pengaduan kedalam sistem LAPOR oleh Pejabat Penghubung	2. Akses Internet			
1. Pengintegrasian seluruh pengaduan kedalam sistem LAPOR oleh Admin Koordinator	1. Komputer			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
Publik Melalui Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	2 1 2 1			
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pelayanan				
2015 tentang Roadmap Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional				
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun		기의 강인 기사 회사는 하는 항상을 잃었다면 했다.		
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional		교통 시간 사람이 있는 이 등에 살았는데 하고 프로젝		
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24	Daerah			
3. Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	3. Memiliki pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat			
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2. Mampu mengoperasikan Komputer			
2. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan	aplikasi SP4N LA			
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Memiliki pemahaman mengenai pengelolaan pengaduan melalui			
DASAR HUKUM	Kualifikasi Pelaksan			
BIDANG KOMUNIKASI SEKSI KEMITRAAN, PEMYIARAN DAN INFORMASI PUBLIK	Nama SOP	Pengelola Pengaduan melalui LAPOR oleh Admin Koordinator dan Admin Pejabat Penghubung		
KABUPATEN TANAH LAUT		NIP. 19630720 198503 1 015		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Drs. H. Husein rianta		
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT		TO THE ORMATIKA		
TARTUNG PANONE		DINAS KOMUNISTA		
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanak Laut		
	Tanggal Efektif	6 Februari 2023		
	Tanggal Revisi	3 Februari 2023		
TANAH LAUT	Tanggal Pembuatan	1 Februari 2023		
	Nomor SOP	500.12.12.3/182/II/Diskiminfo/2023		

Pengelolaan Pengaduan melalui LAPOR oleh Admin Koordinator dan Admin Pejabat Penghubung

		PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
NO.	AKTIVITAS	ADMIN KOORDINATOR	PEJABAT PENGHUBUNG	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima Pengaduan melalui LAPOR	T		1.Komputer 2.Akses Internet		Laporan pengaduan melalui LAPOR	
2.	Memverifikasi dan mendisposisikan laporan, dengan tahapan : - Verifikasi laporan yang relevan, Iengkap dan jelas - Melakukan perubahan redaksi laporan sesuai dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (EYD) - Menganonimkan atau merahasiakan jika laporan bersifat pribadi atau rahasia - Mendisposisikan laporan ke pejabat penghubung perangkat daerah yang berwenang - Melakukan Pending untuk laporan yang kurang lengkap atau masih membutuhkan follow up kepada pelapor - Merubah laporan menjadi Arsip untuk laporan yang tidak relevan atau yang bersifat saran - Memfilter laporan dan mengirimkan kembali ke Admin LAPOR!-SP4N jika laporan tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Aceh - Mendisposisikan ulang apabila terjadi kesalahan /perubahan disposisi - Memonitor tindak lanjut laporan dari pejabat			1. Komputer 2. Akses Internet 3. Laporan lengkap (uraian dan data pendukung)	1-3 hari	Laporan direspon dan/atau diteruskan ke perangkat daerah terkait	Jika pelapor tidak melengkapi data atau dokumen maka laporan tidak ditindak lanjuti
	Memonitor tindak lanjut laporan dari pejabat penghubung perangkat daerah						

3.	Menginformasikan Pengaduan kepada pejabat penghubung melalui grub whatsapp	+		Laporan direspon dan/atau diteruskan ke perangkat daerah terkait	5 menit	Informasi tersampaikan kepada Pejabat Penghubung melalui Grup Whatsapp	
4.	Memberikan respon atas laporan pengaduan, dengan tahapan: Menerima disposisi laporan Admin Koordinator Memberi informasi laporan pengaduan yang masuk kepada kepala perangkat daerah Menyusun redaksi jawaban atas laporan yang diterima - Melaporkan tindak lanjut pengaduan kepada kepala perangkat daerah Memfilter laporan dan mengirimkan request disposisi ulang ke Admin Koordinator jika laporan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan			1. Komputer 2. Akses Internet 3. Laporan lengkap (uraian dan data pendukung)	5-10 hari	Laporan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait	jika tidak ditindaklanjuti dalam 60 hari kerja maka laporan tersebut diteruskan oleh sistem ke Ombudsman RI
5.	Memantau perkembangan tanggapan balik dari masyarakat			Laporan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait	10 hari	Laporan selesai	(jika dalam 10 hari kerja tidak ada tanggapan balik dari pelapor, maka laporan dianggap selesai
	TOTAL WAKTU				10 Hari		